

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN
ANGGARAN**

2010-2016

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Mochammad Faishal Hakim
No. Mahasiswa : 13312001
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN**

2010-2016



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Mochammad Faishal Hakim

No. Mahasiswa : 13312001

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN
2010-2016**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Mochammad Faishal Hakim

No.Mahasiswa: 13312001

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN

2010-2016

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Mochammad Faishal Hakim

No.Mahasiswa: 13312001

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....8/2/2018.....

Dosen Pembimbing,



Arief Rahman, SE, M. Com., Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2010-2016**

Disusun Oleh : **MOCHAMMAD FAISHAL HAKIM**

Nomor Mahasiswa : **13312001**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

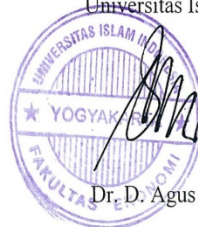
Pada hari Kamis, tanggal: 15 Maret 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.

Penguji : Suwaldiman, SE., M.Accy., Ak., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan"

(QS. Al-Mujaadilah: 11)

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’,”

(Al Baqarah : 45)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Al Insyirah : 5)

“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.”

(HR. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:
Kedua Orang Tua Bapak Ir. Muhammad Noor Ismoyo dan
Ibu Dra. Nurlaela Dimayati .,MM
Untuk kakak Irna Pratiwi
Terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2010-2016**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa'at dari beliau di hari akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini tentunya melibatkan banyak pihak yang turut membantu dalam segala hal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan ridho pada hambamu sehingga memiliki kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Indonesia
3. Dr. Drs. Dwi Praptono Agus Harjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Dekar Urumsah, S.E., M.Com(IS), Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Arief Rahman , SE, M. Com ., Ph..D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, waktu dan tambahan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Rifqi Muhammad, SE., SH ., M.Sc ., SAS. Selaku dosen yang telah memberikan bimbingan konsultasi dan solusi. Memberikan ilmu dan waktunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Ir. Muhammad Noor Ismoyo dan Ibu Dra. Nurlaela Dimayati .,MM yang telah memberikan segala dukungan, waktu, tenaga dan kasih sayangnyakepada penulis hingga saat ini.
8. Kepada kakak saya yang tersayang Irna Pratiwi yang diberikan dukungannya kepada penulis hingga saat ini. Semoga kita bisamembanggakan kedua orang tua dan bermanfaat bagi banyak orang.
9. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung si penulis untuk segera menyelesaikan studinya.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Indonesia, yang telahmemberikan banyak pengetahuan, pengalaman dan ilmu yang bermanfaat.Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini bisa bermanfaat bagisemua.
11. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman semoga agar selalu menjadi instansi pemerintahan yang memajukan bangsa.
12. Teman, sahabat, kawan seperjuangan dari semester satu dari “The Gengs” yaitu : Annisa Mardatila (selaku cabe 1) , Ajeng Nur Prameswari (selaku mimi), Kartika Setyani (selaku cabe 2), terima kasih atas canda tawa,

bahagia, kerja sama dari semester 1 sampai akhir studi. Semoga persahabatan ini bisa terus berlanjut sampai kapanpun.

13. Teman-teman dari “Brothers Over Form Family”, Julio, Erik, Alan, Arief Fahmi, Syahab, Aziz, Azmi, Dandhy, Dena, Dwi, Prof Eka, Imam, Mail, Ismun, Ozi, Aji, Raka, Romi, Said dan Ganda, terima kasih atas segala canda tawa, semangat dan pengalaman selama empat tahun peneliti menempuh pendidikan S-1 disini. Mulai dari bahas hal-hal yang nggak penting sampai serius sekalipun kalian tetap yang terbaik. Semoga pertemanan kita bisa terus berlanjut sampai kapanpun.
14. Teman-teman dari Angkatan Akuntansi 2013 dan 2014 terima kasih atas pengalaman dan dukungannya selama ini. Bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kalian semua.
15. Seluruh teman-teman KKN unit 343, teruntuk mereka yaitu : Mas Suradi (selaku tuan rumah dan sahabat sekaligus orang tua kedua bagi teman-teman KKN 343), Rafy Azano (Abah/selaku ketua tim), Heni Daryati (Umi/selaku mentri dapur), Uni Moulidhya (kakak baik hati dan menyenangkan), Hendra, Ayudhea, Noven, Ostin. Sangat menyenangkan bisa mengenalkan kalian semua meskipun cuma satu bulan tapi semoga kekeluargaan kita bisa berlanjut sampai kapanpun.
16. Teman-teman seperjuangan se-dosbing skripsi, terima kasih atas dukungan selama ini.

17. Seluruh teman-teman FE UII yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua bisa mengharumkan nama UII dimanapun dan sampaikapanpun.

Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah SWT selalu menyertai semuapihak yang telah membantu peneliti selama ini. Peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, maka dari itu saran, kritik dan masukan sangat peneliti harapkan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang akuntansi publik atau bagian kinerja keuangan pemerintah.

Wassalamualaikum Warahatullahi Wabarakatuh

Penulis

Mochammad Faishal Hakim


PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,

Penulis,




(Mochammad Faishal Hakim)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xvi
Abstrak.....	xvii
Abstract.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	3
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	3
1.5 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 KINERJA.....	6
2.2 KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	7
2.3 APBD.....	7
2.4 KINERJA KEUANGAN APBD.....	9

2.4.1	Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	10
2.4.1.1	Analisis Varians Pendapatan Daerah.....	10
2.4.1.2	Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	11
2.4.2	Analisis Rasio Keuangan.....	11
2.4.2.1	Rasio Derajat Desentralisasi.....	11
2.4.2.2	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	13
2.4.2.3	Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Daerah.....	14
2.4.2.4	Derajat Kontribusi BUMD.....	15
2.4.3	Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.....	15
2.4.3.1	Analisis Varians Belanja Daerah.....	15
2.4.3.2	Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah.....	16
2.4.3.3	Analisis Keserasian Daerah.....	16
2.4.3.4	Analisis Efisiensi Belanja.....	16
2.4.4	Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah.....	17
BAB III	METODE PENELITIAN.....	19
3.1	Obyek Penelitian.....	19
3.2	Variabel Penelitian.....	19
3.3	Jenis Data.....	22
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	22
3.5	Metode Analisis Data.....	23
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1	Gambaran Umum Daerah.....	26
4.1.1	Kondisi Geografis.....	26

4.1.2 Data Khusus.....	27
4.2 Pembahasan.....	27
4.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.....	27
4.2.1.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah.....	28
4.2.1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah.....	29
4.2.2 Analisis Rasio Keuangan.....	30
4.2.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi.....	30
4.2.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	32
4.2.2.3 Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Daerah.....	33
4.2.2.4 Derajat Kontribusi BUMD.....	35
4.2.3 Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.....	37
4.2.3.1 Analisis Varians Belanja Daerah.....	37
4.2.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah.....	38
4.2.3.3 Analisis Keserasian Daerah.....	39
4.2.3.4 Analisis Efisiensi Belanja.....	42
4.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah.....	44
4.2.5 Ringkasan Hasil Penelitian.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.1.1 Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.....	47
5.1.2 Kinerja Keuangan Belanja Daerah.....	48
5.1.3 Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah.....	49
5.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal.....	12
2.2 Tabel Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah.....	14
4.1 Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja , Pembiayaan SiLPA Of Sleman Regency , Tahun 2016.....	27
4.2 Tabel Analisis Varians Pendapatan Daerah.....	28
4.3 Tabel Analisis Pertumbuhan Pendapatan.....	29
4.4 Tabel Tingkat Inflasi Nasional dan Kabupaten Sleman.....	30
4.5 Tabel Rasio Derajat Desentralisasi.....	31
4.6 Tabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	32
4.7 Tabel Rasio Efektifitas Pajak Daerah.....	34
4.8 Tabel Rasio Efisiensi Pajak Daerah.....	34
4.9 Tabel Derajat Kontribusi BUMD.....	36
4.10Tabel Analisis Varians Belanja.....	37
4.11Tabel Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah.....	39
4.12 Tabel Analisis Rasio Belanja Operasi.....	40
4.13 Tabel Analisis Rasio Belanja Modal.....	42
4.14 Tabel Analisis Efisiensi Belanja.....	43
4.15 Tabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	44
4.16 Tabel Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD.....	45

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman periode 2010-2016 dan mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman periode 2010-2016.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2016

Setelah melakukan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 11,63%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 34,93 % (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 69,31%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum rasio efektifitas rata-rata 113,52% dan rasio efisiensi rata-rata 4,06 %, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 1,12 %. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 10,52 %, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 85,61 % dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 12,35 %, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata 88,43 % di bawah 100%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, APBD

ABSTRACT

This research was intended to identify financial performance on income and expenditure of Sleman regency in 2010-2016.

This is descriptive qualitative research that tried to describe problem solving by using numbers starting from data collection, interpretation of the data and presentation of its result. Data was collected using documentation technique. The research used secondary data in form of local budget realization Report of Sleman regency in 2010-2016.

After analysis, result of the research indicates that (1) income performance of Sleman regency is good. It was proved with (a) average local income variance was above 100%, (b) local income growth was positive, (c) ratio of local income to decentralization level was 5,03%, local financial dependence ratio was relatively high (69.31), local tax effectiveness ratio was 113.52%, local tax efficiency ratio was 4.06%, and contribution of local owned enterprise was 1.12%. (2) In general performance of expenditure finance in Sleman Regency was good. It was indicated with local expenditure variance was below 100%, local expenditure grew averagely 10.52%. In addition, about local expenditure balance, Sleman government allocated most budget for operational expenditure (71,34%), compared capital expenditure (12.35%). Average local expenditure efficiency was 88.43% (below 100%).

Keywords: financial performance, income budget, expenditure budget, local budget

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut memerlukan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggungjawab secara berimbang antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali

kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kinerja akan meningkatkan kinerja anggaran daerah.

Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Dasar yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: “**Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2010-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2016 berdasarkan perhitungan rasio dan analisis yang terdiri dari analisis varians pendapatan daerah, analisis pertumbuhan pendapatan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja daerah, analisis keserasian belanja daerah, analisis efisiensi belanja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kinerja satuan kinerja

perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten Sleman agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

2. Bagi pihak investor dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja pemerintah daerah kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan potensi - potensi yang ada.
3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna dalam menambah wawasan peneliti dan dapat menjadi referensi dan data tambahan dalam mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab yang akan di rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kerangka teoritis dan penggambaran teori yang melandasi penelitian mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sleman meliputi : kinerja, kinerja keuangan, kinerja keuangan pemda, sejarah APBD, dan kinerja APBD.

BAB III METODOLOGI

Bab ini akan membahas tentang metologi yang dipergunakan dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai obyek penelitian, variable penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan tentang deskripsi data hasil penelitian dimana akan diuraikan mengenai deskripsi obyek penelitian dan pembahasan instrumen penelitian, selanjutnya diuraikan mengenai pengujian persyaratan pengolah data, serta diuraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Dalam bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian. Mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang mungkin dapat diantisipasi oleh peneliti selanjutnya dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan. (Mangkunegara : 2002). Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi. Yang dilakukan oleh segala segmen, peringkat dan jabatan di suatu instansi ataupun organisasi.

Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan.

Dalam (Darise : 2008) Kinerja Keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual

yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah adalah kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran. Dapat disimpulkan dari kedua definisi diatas adalah kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil output pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk pembangunan daerah yang dicantumkan dalam laporan anggaran dan realisasi dalam bentuk nominal maupun realisasi pembangunan. Pengukuran kinerja sektor publik atau pemerintah daerah bertujuan untuk menentukan pelayanan yang baik kepada publik. (Mardiasmo : 2009)

2.4 APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran. (Halim dan Kusufi : 2014).

APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukkan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun. Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
2. Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas.

Pada era reformasi, keuangan daerah mengharuskan laporan keuangan semakin informatif yang dimana APBD mengalami perubahan yang didasari oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah. Namun saat ini APBD yang digunakan didasari oleh :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 59 Tahun 2007 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
4. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Saat ini, APBD terbaru terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan, belanja dan pembiayaan didalam APBD terbaru dikelompokkan kembali menjadi :

1. Pendapatan , yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:
 - a) Pendapatan Asli daerah (PAD).
 - b) Dana Perimbangan.

- c) Pendapatan lain-lain daerah yang sah.
2. Belanja , yang dikelompokkan menjadi dua bagian , yaitu :
- a) Belanja tidak langsung , berisi kategori seperti belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
 - b) Belanja langsung , berisi kategori seperti belanja pegawai honorarium dan penghasilan yang terkait dengan pelaksanaan barang dan jasa, belanja modal, belanja barang dan jasa.
3. Pembiayaan , yang dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan sumber biaya, yaitu :
- a) Sumber pembiayaan penerimaan.
 - b) Sumber pembiayaan pengeluaran.

2.5 Kinerja Keuangan APBD

Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah adalah kinerja keuangandaerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan oleh kebijakan atau perundang-undangan yang diukur selama periode anggaran. Yang dimana pengukurannya dalam penelitian mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend atau tendensi dan analisis rasio. Yang dimana pengukurannya dengan menilai dari kinerja keuangan APBD

Dalam buku karangan Mahmudi yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2016) analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam tiga bagian yaitu :

2.5.1 Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah yang secara umum dinilai dari besar kecilnya antara realisasi pendapatan dan anggarannya. Salah satu indikator kinerja dapat dikatakan baik apabila realisasi melampaui anggaran atau target yang telah ditentukan. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dikatakan baik tidak hanya melihat realisasi pendapatan keuangan telah melampaui target anggaran atau belum, tetapi juga melihat komponen pendapatan lain yang lebih berpengaruh.

Berdasarkan realisasi anggaran, kita dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dengan cara :

2.5.1.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah.

Cara ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan dana yang dianggarkan. Hasil selisih anggaran tersebut berguna untuk memberikan informasi bagi pengguna dalam menganalisis kinerja pendapatan. Anggaran pendapatan adalah target minimal yang harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Dimana Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah target anggaran yang telah ditentukan. Sebaliknya, apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan atau dapat dikatakan tidak mencapai target anggaran, maka hal itu dinilai kurang baik bahkan dapat dikatakan buruk.

Realisasi pendapatan seharusnya minimal dapat mencapai target anggaran atau dapat melampaui target anggaran yang ditentukan. Selisih lebih dari realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

2.5.1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Analisis ini berguna untuk mengetahui apakah kinerja keuangan APBD pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran mengalami pertumbuhan secara positif (membaik) ataukah negatif (menurun) daripada periode sebelumnya. Diharapkan mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya meningkat dari periode anggaran sebelumnya, sehingga mendapatkan Kinerja Keuangan yang semakin baik. Jika terjadi hal yang sebaliknya yaitu mengalami pertumbuhan yang negatif atau menurun dari periode sebelumnya atau tidak mencapai target, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Diharapkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

2.5.2 Analisis Rasio Keuangan

2.5.2.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini merupakan tolak ukur kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan. Kemampuan daerah dalam melakukan

penyelenggaraan desentralisasi adalah dengan ditunjukkan tingginya PAD, semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dalam mengelola potensi-potensi kekayaan yang dimiliki oleh daerahnya. Rasio ini menunjukkan derajat desentralisasi dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan yang dimana semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mengnyelenggarakan desentralisasi. Sedangkan menurut Bisma (2010) “Tingkat desentralisasi fiskal merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

2.5.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah propinsi. Apabila rasio ini semakin tinggi maka sebagai salah satu tolak ukur kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah dan kurangnya kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya. Apabila semakin kecil rasio ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan daerah sendiri dari sumber-sumber yang dimilikinya. Sedangkan menurut Bisma (2010) “Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD dengan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”. Kriteria penilaian ketergantungan daerah dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010)

2.5.2.3 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang telah ditargetkan. Dapat dianggap baik apabila rasio ini minimal mencapai hasil angka satu atau 100 persen. Untuk dapat menghitung rasio ini diperlukannya data tentang biaya pemungutan pajak daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang telah dicapai kurang dari sepuluh persen. Dimana biaya pemungutan paling tinggi 5 % dari realisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan pasal 76 PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

2.5.2.4 Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar kontribusi perusahaan BUMD daerah dalam pemasukkan pendapatan daerah.

2.5.3 Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah penting dilakukan dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD-nya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Apakah pemerintah daerah dalam penganggarannya telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja Keuangan Belanja Daerah bisa dikatakan baik apabila realisasinya lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam belanja daerah diperlukannya analisis keserasian belanja karena terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi-informasi yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan Analisis Kinerja Anggaran Belanja Daerah dengan cara :

2.5.3.1 Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis Varians Belanja Daerah merupakan analisis dari hasil selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Yang bermanfaat bagi pengguna untuk mengetahui hasil besarnya varians antara realisasi dan anggaran belanja yang dinyatakan dalam bentuk nominal maupun persentase. Dapat dikatakan baik dari hasil varians ini adalah apabila pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi belanja. Apabila pemerintah tidak dapat melakukan efisiensi belanja maka dapat dikategorikan atau

adanya indikasi dari Kinerja Keuangan Belanja Daerah yang kurang baik atau dikarenakan adanya jumlah realisasi belanja yang lebih besar dari jumlah anggaran yang ditargetkan.

2.5.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat dalam mengevaluasi atau mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun apakah meningkat (cenderung positif) atau bahkan menurun (cenderung negatif). Pada umumnya belanja mengalami kenaikan dalam tiap periode. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian cakupan makro ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan belanja harus diimbangi dengan pendapatan yang memadai atau seimbang.

2.5.3.3 Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio Keserasian Belanja Daerah merupakan gambaran atau menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana belanja secara optimal. Dimana anggaran yang terkait sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas. Perlu adanya harmonisasi belanja dari pemerintah daerah agar fungsi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Analisis keserasian belanja dapat dihitung dengan perbandingan Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja.

2.5.3.4 Analisis Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Tidak ada standar baku atau tetap dalam

mengukur analisis ini, dimana hasil dari analisis ini bersifat relatif. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen, jika hasil analisis lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Sebagaimana dimaksud adalah apabila realisasi belanja terhadap realisasi anggaran belanja lebih kecil berarti dapat dikatakan baik sedangkan apabila realisasi belanja dengan realisasi anggaran belanja melebihi anggaran tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melakukan efisiensi belanja atau dapat dikatakan terjadi pemborosan belanja daerah.

2.5.4 Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Analisis ini dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah dan berguna untuk mengetahui atau membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan salah satu bagian dari pembiayaan yang dimana dalam struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkannya terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran atau periode. Keberadaan SiLPA memungkinkan salah satu indikator Kinerja Keuangan APBD yang baik pada tahun anggaran bersangkutan.

Kinerja keuangan APBD secara umum dapat dikatakan baik dapat dilihat dari Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah, Kinerja Keuangan Belanja Daerah, dan Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah sudah mencapai nominal yang ditargetkan. Apabila semua sudah mencapai target yang ditentukan maka pemerintah daerah dilihat dari kinerja keuangan APBD atau kinerja keuangan

pemerintah daerah sudah dapat dikatakan baik dalam pengembangan dan pengelolaan daerahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman yang menerbitkan APBD tahun 2010-2016.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel dan definisi operasional variabel adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Keuangan

a. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah merupakan informasi selisih anggaran yang didapat dari selisih antara realisasi pendapatan dengan dana yang dianggarkan. Dari varians ini dapat menilai kinerja pemerintah daerah yang dimana kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah target anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat dalam mengetahui kinerja keuangan APBD pemerintah daerah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan dari periode anggaran sebelumnya.

2. Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Analisis rasio ini merupakan tolak ukur kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan. Yang dapat diukur tidak atau mempunya pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah diukur dari semakin tingginya PAD.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Analisis rasio ketergantungan daerah menunjukkan kemandirian pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang dimana diukur dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. yang dimana semakin tinggi hasil rasio ini maka semakin kurang tingkat kemandirian pemerintah daerah.

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang telah ditargetkan. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dapat dikategorikan efisien apabila rasio yang telah dicapai kurang dari

sepuluh persen. Untuk biaya pemungutan retribusi paling tinggi 5 % dari realisasi pajak dan retribusi daerah sesuai dengan pasal 76 PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

d. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

3. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

a. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja daerah merupakan analisis terhadap selisih antara realisasi belanja dan anggaran yang berguna bagi pengguna untuk dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang dinyatakan dalam bentuk jumlah nilai nominal dan dalam bentuk persentase.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis ini berguna untuk mengetahui apakah pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun apakah mengalami pertumbuhan atau mengalami penurunan.

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasinya dananya pada belanja secara optimal yang diukur dengan perbandingan antara analisis belanja operasi terhadap total belanja dengan analisis belanja modal terhadap total belanja.

d. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Yang artinya tidak ada standar tetap atau baku yang dianggap baik dalam rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2007). Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap catatan dan dokumen seperti laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif adalah dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian ini menjelaskan gambaran secara umum fakta dan aktual terhadap fenomena yang diteliti yaitu bidang analisis Kinerja Keuangan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Subjek dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan objek pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sleman tahun 2010 – 2016.

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menghitung kinerja Pemda Sleman periode 2010-2016. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. Analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat. Untuk menjawab

permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

RUMUS PERHITUNGAN :

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis varians} = \frac{\text{realisasi pendapatan tahun t}}{\text{anggaran pendapatan tahun t}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

$$\text{Analisis pertumbuhan} = \frac{\text{pend.tahun t} - \text{pend.tahun t-1}}{\text{pend.tahun t}} \times 100\%$$

3. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{pendapatan transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rasio efektifitas pajak daerah} = \frac{\text{realisasi pend.pajak daerah}}{\text{target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efisiensi pajak daerah} = \frac{\text{biaya pemerolehan pajak daerah}}{\text{realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

6. Derajat Kontribusi BUMD

$$\text{Derajat kontribusi BUMD} = \frac{\text{pend. bagian laba BUMD}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

7. Analisis Varians Belanja Daerah

$$\text{Analisis varians} = \frac{\text{realisasi belanja tahun t}}{\text{anggaran belanja tahun t}} \times 100\%$$

8. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\text{Pertumbuhan Tahun t} = \frac{\text{realisasi belanja tahun t} - \text{realisasi belanja tahun t-1}}{\text{realisasi pendapatan tahun t-1}} \times 100\%$$

9. Analisis Keserasian Belanja Daerah

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio belanja Operasi} = \frac{\text{realisasi belanja operasi}}{\text{total belanja daerah}}$$

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio belanja Modal} = \frac{\text{realisasi belanja modal}}{\text{total belanja daerah}}$$

10. Analisis Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisasi belanja daerah}}{\text{anggaran belanja daerah}} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah

4.1.1 Kondisi Geografis.

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

4.1.2 Data Khusus

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja, Pembiayaan *SILPA* of
Sleman Regency, 2010 – 2016

Tahun anggaran Year	Pendapatan Income	Belanja Expenditure	Pembiayaan bersih Netto Funding	SILPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	1.096.205.412,74	1.108.673.575,10	150.387.381,61	137.919.219,25
2011	1.311.473.547,85	1.278.055.164,51	105.276.125,33	111.413.870,27
2012	1.589.722.974,41	1.521.401.170,88	120.758.071,18	138.694.508,68
2013	1.899.525.636,83	1.693.528.297,00	120.758.071,18	431.359.469,61
2014	2.076.820.131,08	1.896.477.377,49	319.381.911,21	499.724.664,81
2015	2.294.622.764,76	2.328.021.614,78	512.650.787,02	479.251.937,00
2016	2.329.097.456, 01	2.455.446.948,87	464.117.988,14	337.768.495,27

sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2010 - 2016

4.2 Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 yang dilakukan dalam tiga bagian:

4.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dinilai baik bila realisasi pendapatan melebihi target pendapatan. Tapi dengan memperhatikan faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan. : antara lain Analisa Varians Pendapatan Daerah, Analisa Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Analisa Rasio Keuangan (meliputi Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio

Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah ,Derajat Kontribusi BUMD).

4.2.1.1 Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah merupakan informasi selisih anggaran yang didapat dari selisih antara realisasi pendapatan dengan dana yang dianggarkan. Dari varians ini dapat menilai kinerja pemerintah daerah yang dimana kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah target anggaran (Mahmudi 2016).

Tabel 4.2 Analisis Varian Pendapatan Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Hasil (dalam %)
2010	1.096.899.222.057,99	1.095.628.887.559,93	99,88
2011	1.272.583.652.677,00	1.311.473.547.855,47	103,06
2012	1.475.128.477.847,31	1.589.722.974.409,13	107,77
2013	1.768.438.488.349,11	1.899.525.636.838,83	107,41
2014	1.969.264.200.317,70	2.076.820.131.084,13	105,46
2015	2.262.230.417.718,80	2.294.622.764.756,12	101,43
2016	2.183.747.824.232,36	2.329.097.456.006,80	106,66
Rata-rata			104,52

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah baik, karena realisasi tercapai melebihi targetnya.

Tapi perlu dilihat varian yang mempengaruhi lainnya berdasarkan perhitungan yang ada.

4.2.1.2 Analisa Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisa Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah tahun Anggaran yang bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan positif atau negatif.

Tabel 4.3 Analisa Pertumbuhan Pendapatan.

Tahun	Pendapatan pertahun	Tahun Pertumbuhan	Pertumbuhan(%)
2010	1.096.899.222.057,99		
2011	1.272.583.652.677,00	2010-2011	16,46
2012	1.475.128.477.847,31	2011-2012	17,50
2013	1.768.438.488.349,11	2012-2013	16,31
2014	1.969.264.200.317,70	2013-2014	8,54
2015	2.262.230.417.718,80	2014-2015	9,49
2016	2.183.747.824.232,36	2015-2016	1,48
Rata - rata			11,63

Dari hasil perhitungan dirangkum tabel diatas ada pertumbuhan pendapatan yang bervariasi setiap tahunnya tapi bila di rata - rata untuk 7 tahun terakhir masih diatas 10 % tepatnya 11,63 % artinya Kabupaten Sleman untuk 7 tahun terakhir tingkat pertumbuhan pendapatan cukup baik karena rata - ratanya

diatas 10 % dikarenakan pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari perbandingan dengan tingkat pertumbuhan inflasi Kabupaten Sleman yang memiliki rata-rata 3 % (rata-rata dari tahun 2009-2015).

Tabel 4.4 Tingkat Inflasi Nasional dan Kabupaten Sleman

Tahun	Inflasi Nasional (%)	Inflasi Kab Sleman (%)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2009	2,78	4	
2010	6,96	7,5	3,5
2011	3,79	3,1	-4,4
2012	4,3	4	0,9
2013	8,38	6,9	2,9
2014	8,36	5,8	-1,1
2015	3,35	4,2	-1,6
Rata-rata	5,42	5,07	0,03

sumber : BPS Sleman

4.2.2 Analisis Rasio Keuangan

4.2.2.1 Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Derajat Desentralisasi.

Tabel 4.5 Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Hasil Rasio (dalam %)
2010	163.530.209.690,15	1.096.899.222.057,99	14,91
2011	203.416.683.768,00	1.272.583.652.677,00	17,29
2012	241.003.081.720,31	1.475.128.477.847,31	18,94
2013	342.895.370.197,81	1.768.438.488.349,11	23,65
2014	474.917.917.941,46	1.969.264.200.317,70	27,61
2015	577.585.009.141,24	2.262.230.417.718,80	28,03
2016	648.841.915.155,32	2.183.747.824.232,36	30,79
Rata-rata			34,93

Berdasar perhitungan derajat Desentralisasi tahun 2010 sebesar 14,91 % dan selama 7 th berturut turut mengalami kenaikan rata rata per tahun 2,8 % sehingga di tahun 2016 mengalami kenaikan 30,79 %. Meskipun setiap tahun terjadi kenaikan hasil persentase rasio derajat desentralisasi. Hasil rasio derajat desentralisasi Kabupaten Sleman masih dibawah 50 %, menurut tabel 2.1 yang bersumber dari Tim Litbang Depdagri, tingkat penilaian desentralisasi fiskal dikategorikan cukup. Sehingga Kabupaten Sleman belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan Kabupaten Sleman masih perlu adanya DAU dan DAK dari Pemerintah Pusat.

4.2.2.2 Rasio Ketergantungan Keuangan daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut Bisma (2010) dalam tabel 2.2 jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 20% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah:

Tabel 4.6 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Hasil Rasio (dalam %)
2010	909.205.932.367,84	1.096.899.222.057,99	83,05
2011	737.072.791.549,00	1.272.583.652.677,00	57,48
2012	1.233.129.240.777,00	1.475.128.477.847,31	80,62
2013	1.425.543.181.151,30	1.768.438.488.349,11	75,94
2014	1.494.346.282.376,24	1.969.264.200.317,70	72,18
2015	1.101.084.018.000,00	2.262.230.417.718,80	47,07
2016	1.528.251.806.778,04	2.183.747.824.232,36	68,82
Rata-rata			69,31

Pada tahun 2010 pemerintah Daerah Kabupaten Sleman masih ada ketergantungan dari dana pusat terutama lebih ke pembayaran gaji PNS terlihat dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan Daerah yaitu sebesar 83,05 %

untuk tahun selanjutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2016 mencapai 68,82 %. Berdasarkan tabel 2.2 yang bersumber dari Tim Litbang Depdagri, dapat dikategorikan tingkat ketergantungannya masih tinggi karena masih di atas 50%. Dapat diartikan pemda Kabupaten Sleman masih perlu adanya transfer dana dari pemerintah pusat berupa DAU dan DAK.

4.2.2.3 Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b) Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio Efektifitas Pajak Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah. Rasio Efektifitas Pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%, sedang Rasio Efisiensi Pajak dikatakan baik jika kurang dari 10% (terdiri dari max 5 % untuk biaya operasional sedang yang 5 % untuk Insentif pengelola Pajak dan redistribusi Daerah sesuai dengan pasal 76 PP Nomor 65 Tahun 2001).

Tabel 4.7 Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Hasil Rasio (dalam %)
2010	80.611.542.955,52	75.969.096.600,00	106,11
2011	142.689.407.280,12	122.700.165.400,00	116,29
2012	177.835.870.150,47	148.350.000.000,00	119,88
2013	274.628.955.500,77	223.900.000.000,00	122,66
2014	326.003.995.236,66	282.100.000.000,00	115,56
2015	373.137.768.070,80	346.000.000.000,00	107,84
2016	407.675.230.792,56	383.400.000.000,00	106,33
Rata-rata			113,52

Tabel 4.8 Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Tahun	Biaya Pemerolehan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Hasil Rasio (dalam %)
2010	6.548.364.140,00	80.611.542.955,52	8,12
2011	3.756.040.000,00	142.689.407.280,12	2,63
2012	1.525.513.229,00	177.835.870.150,47	1
2013	14.011.340.673,00	274.628.955.500,77	5
2014	14.438.539.650,00	326.003.995.236,66	4
2015	13.930.370.957,50	373.137.768.070,80	4
2016	14.514.182.500,00	407.675.230.792,56	4
Rata-rata			4,06

Dari kedua tabel diatas untuk efektifitas sudah baik karean selama 7 tahun sudah diatas 100 %, tapi untuk efisiensi pada tahun 2010 rasio efisiensinya buruk melebihi dari 5 %, sesuai dengan pasal 76 PP Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah , yang dimana biaya pemungutan paling tinggi 5 % dari realisasi pajak dan retribusi daerah. Sedang ambang dinyatakan baik bila masih dikisaran 1-5 %. Pada tahun 2010 biaya perolehan Pajak Daerah tinggi karena awal pendaerahan Pajak BPHTB banyak sarana dan prasarana yang harus dibenahi. Awal pendaerahan pajak BPHTB merupakan perubahan awal pajak BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Perubahan tersebut tidak disertai dengan tranfer sarana prasana dari pusat. Dimana penerapan diserahkan kepada masing-masing daerah sesuai dengan aturan masing-masing. Sehingga perlunya pembenahan dari sarana dan prasarana. Tapi untuk tahun selanjutnya terakhir tahun 2016 rasio efisiensi sudah baik, karena tidak melebihi kisaran 5 %.

4.2.2.4 Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka dikatakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Tabel 4.9 Derajat Kontribusi BUMD

Tahun	Pend Bagian Laba BUMD	Total Pendapatan Daerah	Hasil (dalam %)
2010	10.169.824.623,38	1.096.899.222.057,99	0,93
2011	11.036.188.376,45	1.272.583.652.677,00	0,84
2012	12.783.121.935,56	1.475.128.477.847,31	0,80
2013	15.551.529.372,17	1.768.438.488.349,11	0,82
2014	23.654.901.728,19	1.969.264.200.317,70	1,14
2015	34.330.598.540,50	2.262.230.417.718,80	1,50
2016	42.031.674.753,95	2.183.747.824.232,36	1,80
Rata-rata			1,12

Kabupaten Sleman memiliki 2 BUMD yaitu PDAM dan Bank Sleman. Kontribusi persentase laba yang harus disetor ke Pemda oleh masing-masing BUMD adalah sebesar, untuk PDAM sebesar 50% dari Laba Bersih PDAM (sesuai Perda PDAM yaitu Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 tahun 2010 pasal 64) dan Bank Sleman sebesar 50% dari Laba Bersih Bank Sleman (sesuai Perda Bank Sleman yaitu Perda Kabupaten Sleman Nomor 20 tahun 2013 pasal 60). Pada tahun 2010 sampai tahun 2013 persentasenya bervariasi masih dibawah 1 %. Disebabkan karena PDAM masih harus menyelesaikan sisa hutang pembangunan beberapa sarana dan prasarana dengan pemerintah pusat. Tahun 2012 PDAM dapat tambahan setoran modal dari Pemda Sleman sebesar 50 Milyar untuk revitalisasi sarana dan prasarana. Baru tahun 2013-2016 PDAM dapat

memberikan kontribusi bervariasi yaitu 0,66% sampai 0,94%. Sedangkan untuk Bank Sleman tahun 2010 sampai tahun 2016 kontribusi persentase laba yang harus disetor ke Pemda Sleman bervariasi yaitu 7,7% sampai 13,9% masih dibawah ketentuan yang ada yaitu 50%, meskipun jauh lebih baik dari PDAM. Sehingga Derajat Kontribusi BUMD makin tahun makin meningkat, walaupun tidak signifikan tetapi dapat meningkat diatas 1 %. Dampak derajat kontribusi ini secara keseluruhan tidak optimal, sehingga perlunya pembinaan dan pengawasan khusus kepada PDAM.

4.2.3 Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah.

4.2.3.1 Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran. Kinerja Keuangan pemerintah daerah dikatakan baik dan efisien jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan), sedangkan dikatakan tidak baik jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan).

Tabel 4.10 Analisis Varians Belanja

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Hasil Analisis (dalam %)
2010	1.244.286.348.597,65	1.131.602.398.904,14	90,94
2011	1.376.859.030.800,05	1.278.055.164.511,30	92,82
2012	1.595.739.879.570,00	1.421.401.170.875,33	89,07
2013	1.946.380.363.064,13	1.693.528.297.005,79	87,01
2014	2.288.645.856.460,56	1.896.477.377.488,36	82,86

2015	2.770.682.731.330,03	2.328.751.919.925,33	84,05
2016	2.434.726.681.006,42	2.245.076.670.449,00	92,21
Rata-rata			88,43

Dari analisis Varians Belanja Daerah, secara umum Kinerja Keuangan Belanja Kabupaten Sleman dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja dari tahun 2010-2016 mempunyai angka rata-rata 88,43 %. Secara umum dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Kabupaten Sleman dapat dikatakan baik, karena pemerintah daerah Sleman mampu melakukan efisiensi belanja. Hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencapai hanya 88,43 %. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 92,82 %, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 82,86 %. Semua nya dibawah 100 %.

4.2.3.2 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Tabel 4.11 Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Tahun	Hasil Analisis (dalam %)
2010	1.131.602.398.904,14		
2011	1.278.055.164.511,30	2010 – 2011	11,46
2012	1.421.401.170.875,33	2011 – 2012	10,08
2013	1.693.528.297.005,79	2012 – 2013	16,07
2014	1.896.477.377.488,36	2013 – 2014	10,70
2015	2.328.751.919.925,33	2014 – 2015	18,56
2016	2.245.076.670.449,00	2015 – 2016	-3,73
Rata -rata			10,52

Dari perhitungan yang telah dirangkum pada tabel tahun 2010 - 2011 : 11,46 % , selanjutnya bervariasi : tahun 2011-2012: 10,08 tahun 2012-2013 : 16,07 : tahun 2013 -2014: 10,70 , tahun 2014 -2015 : 18,56 dan tahun 2015-2016 : - 3,73 . Khususnya ditahun 2015- 2016 terjadi angka – 3,73 karena pada tahun 2016 terjadi rasionalisasi Belanja Daerah dari hasil Evaluasi Gubernur untuk APBD tahun 2016 , untuk semua sektor Belanja Daerah.

4.2.3.3 Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Rasio ini

menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi

Tabel 4.12 Analisis Rasio Belanja Operasi

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Hasil Rasio (dalam %)
2010	989.131.133.924,33	1.131.602.398.904,14	87,41
2011	1.183.609.573.219,50	1.278.055.164.511,30	92,61
2012	1.241.689.260.072,05	1.421.401.170.875,33	87,36
2013	1.420.339.683.204,62	1.693.528.297.005,79	83,87
2014	1.542.756.893.656,11	1.896.477.377.488,36	81,35
2015	1.910.262.382.488,19	2.328.751.919.925,33	82,03
2016	1.900.585.606.945,67	2.245.076.670.449,00	84,66
Rata-rata			85,61

Dari Analisis Keserasian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Berdasarkan tabel perhitungan di atas menunjukkan bahwa tahun 2010-2016 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja masih relatif kecil yaitu 12,35 % dibandingkan dengan Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja rata – rata selama 7 tahun sebesar 85,61%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar dialokasikan untuk

belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran. Hal ini terjadi karena aset-aset Kabupaten Sleman cukup banyak dan perlu biaya operasional untuk pemeliharannya. Baik aset yang bergerak misal mobil dinas untuk operasional maupun kendaraan berat terutama yang ada di DPU dan aset yang tidak bergerak misal gedung perkantoran, gedung sekolah, jalan, jembatan, jaringan dan instalasi pengairan. Keseluruhan total aset pemerintah Kabupaten Sleman yang perlu mendapat biaya operasional dan pemeliharaan (sejumlah 3.711.364 unit barang). Dampak dari besarnya Belanja Operasional adalah akan mengendala program revitalisasi aset-aset daerah untuk tahun-tahun berikutnya. Maka Pemda Sleman harus menyusun kajian dan analisa yang lebih mendalam atas aset-aset daerah berdasarkan perbandingan asas manfaat dan biaya yang dikeluarkan. Bisa dimungkinkan sebagian aset-aset tersebut memang sudah tak layak perlu proses penghapusan dengan jalan pemusnahan atau dilelang. Menurut Mahmudi (2010) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi. Tetapi perbandingan Total Belanja modal terhadap Total belanjanya masih relatif kecil dapat dilihat pada tabel Rasio Belanja Modal.

Tabel 4.13 Rasio Belanja Modal

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Hasil Rasio (%)
2010	99.812.269.370,81	1.131.602.398.904,14	8,82
2011	96.111.399.134,72	1.278.055.164.511,30	7,52
2012	132.536.252.044,00	1.421.401.170.875,33	9,32
2013	206.859.865.136,17	1.693.528.297.005,79	12,21
2014	282.862.049.259,00	1.896.477.377.488,36	14,92
2015	426.782.827.408,85	2.328.751.919.925,33	18,33
2016	344.002.326.231,33	2.245.076.670.449,00	15,32
Rata-rata			12,35

Berdasarkan perhitungan tabel Pemerintah Daerah Sleman dari tahun 2010 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan Belanja Modal rata-rata pertahunnya sebesar 12,35 %. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, kesehatan dan pendidikan. Dari hasil rasio belanja operasional dan hasil rasio belanja modal, dalam hasil tersebut Kabupaten Sleman memiliki rasio belanja operasional yang lebih besar yang mengakibatkan rasio belanja modal yang lebih kecil dikarena tidak mendesaknya untuk pengadaan aset baru atau pembuatan aset baru dikarenakan aset lama dan masih layak dipakai. Sehingga lebih besar perlunya biaya operasional dan pemeliharaan yang banyak karena aset Kabupaten Sleman cukup banyak atau mencapai 3.711.364 unit barang.

4.2.3.4 Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio Efisiensi Belanja Daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya

pemborosan anggaran. Berikut ini tabel perhitungan Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2010-2016.

Tabel 4.14 Analisa Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Hasil Analisis (dalam %)
2010	1.131.602.398.904,14	1.244.286.348.597,65	90,94
2011	1.278.055.164.511,30	1.376.859.030.800,05	92,82
2012	1.421.401.170.875,33	1.595.739.879.570,00	89,07
2013	1.693.528.297.005,79	1.946.380.363.064,13	87,01
2014	1.896.477.377.488,36	2.288.645.856.460,56	82,86
2015	2.328.751.919.925,33	2.770.682.731.330,03	84,05
2016	2.245.076.670.449,00	2.434.726.681.006,42	92,21
Rata-rata			88,43

Berdasarkan tabel Analisis Efisiensi Belanja Daerah, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Pemda Sleman tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hasil analisa diatas angka bervariasi untuk tahun 2010 hasilnya 90, 94 % sampai tahun 2016 sebesar 92,10 % , bila di dirata- rata dalam 7 tahun menunjukkan bahwa Pemda Sleman telah melakukan Efisiensi Belanja untuk tahun 2010-2016. Menurut Mahmudi (2010) angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

4.2.4 Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah.

Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling penting dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran. Keberadaan SiLPA memberikan sinyal adanya Kinerja Keuangan APBD yang baik pada tahun anggaran bersangkutan. Perhitungan SiLPA dapat digunakan untuk menilai Kinerja Keuangan anggaran. SiLPA yang bersaldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Sebaliknya jika terjadi SiKPA (Sisa Kurang Perhitungan Anggaran), hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam manajemen keuangan daerah dan mengganggu kesinambungan fiskal daerah. Analisis SiLPA dimaksudkan untuk mengevaluasi tentang penyebab terjadinya SiLPA, apakah karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran, atau karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah, atau justru karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana dengan optimal.

Tabel 4.15 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Tahun	SiLPA
2010	111.413.870.267,05
2011	138.694.508.682,82
2012	289.079.874.715,22
2013	431.359.469.619,86
2014	499.724.664.810,23
2015	478.521.631.855,02

2016	337.768.495.273,58
Rata - rata	326.651.787.889,11

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah khususnya pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemda Sleman bersaldo positif. Pertumbuhan SiLPA tahun 2010-2016 secara berurutan adalah Rp 111.413.870.267,05; Rp 138,694,508,682,82; Rp 289.079.874.715,22; Rp 431.359.469.619,86 Rp 499.724.664.810,23; Rp 478.521.631.855,02; Rp 337.768.495.273,48. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggaran.

4.2.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Ringkasan hasil penelitian mengenai Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Sleman

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian (Rata - rata)
A.	Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah	
	1. Analisis Varians Pendapatan Daerah	104,52%
	2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah	11,63%
	3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah	
	a. Derajat Desentralisasi	34,93%
	b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	69,31%
	c. Rasio Efektifitas Pajak	113,52%
	d. Rasio Efisiensi Pajak	4,06%

	e. Derajat Kontribusi BUMD	1,12%
B.	Kinerja Keuangan Belanja Daerah	
	1. Analisis Varians Belanja	88,43%
	2. Analisis Pertumbuhan Belanja	10,52%
	3. Analisis Keserasian Belanja	
	a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	71,34%
	b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	12,35%
	4. Analisis Efisiensi Belanja	88,43%
C.	Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	326.651.787.889,11

Sumber: Data diolah (2010-2016)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

5.1.1 Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dilihat dari Analisis Varians Pendapatan Daerah, secara umum dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan target anggaran pendapatan dari tahun 2010-2016 mempunyai angka rata-rata 104,52%.

2) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dilihat dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2010-2016 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 11,63 %. Kecenderungan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun karena pertumbuhan Dana Perimbangan yang juga fluktuatif.

3) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Sleman dapat dikatakan rendah dengan rata-rata Derajat Desentralisasi tahun 2010-2016 adalah 34,93 %; Ketergantungan Keuangan Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2016 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat yang ditunjukkan dari rasio ketergantungan daerah

yang melebihi angka 50%; Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini DPKAD sangat efisien dan efektif dalam menggunakan biaya pemungutan pajak untuk dapat merealisasikan pendapatan yang diterima dengan tingkat efisiensi rata-rata pajak daerah adalah 4,06 % dan tingkat efektif rata-rata adalah 113,52 %; derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 1,12 % untuk Derajat Kontribusi BPD Sleman ,PDAM dan Derajat Kontribusi Bank Pasar.

5.1.2 Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah secara umum Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikatakan baik karena dari tahun 2010-2016 tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran.

2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sleman menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Pemda Sleman tahun 2010-2016 adalah fluktuatif. Hal ini wajar terjadi karena beberapa faktor yaitu pengeluaran untuk gaji pegawai yang terus naik dari setiap tahunnya, serta tingkat inflasi pada tahun berjalan.

3) Analisis Kecerassian Belanja Daerah Dari Analisis Kecerassian Belanja Daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operaional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil.

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah Dari Analisis Efisiensi Belanja Daerah, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Pemda Sleman tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Sleman telah melakukan Efisiensi Belanja untuk tahun 2010-2016. Menurut Mahmudi (2016) angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

5.1.3 Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah

Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dari Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah secara umum sudah baik terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tepat dalam menyajikan suatu rencana anggaran.

5.2 Saran

Saran yang dapat ditarik dari kesimpulan adalah :

- 1) Untuk Pemda Sleman Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perlu lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan potensi-potensi baru daerah dan pengembangan potensi daerah. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
- 2) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan PAD oleh aparat.

b. Pemerintah Daerah perlu mencari alternatif lain untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak semakin besar. Peningkatan PAD diharapkan tidak menghambat investor untuk menanamkan modalnya. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi dengan memberikan insentif bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya ke Kabupaten Sleman. Dengan meningkatnya investasi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka PAD juga akan meningkat. Peran swasta perlu ditingkatkan dengan mengadakan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui pengembangan ekonomi lokal.

c. Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya fokus dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang cepat tetapi harus memperhatikan pemerataan pembangunan, karena strategi pengembangan

tersebut sangat rapuh dan peka terhadap faktor eksternal maupun perubahan ekonomi di luar wilayah.

2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johan, Greg Tower, dan Stacey Porter. 2013. *“Fiscal Policy Disclosure In Indonesia Local Government”*, JAAI Volume 17 No. 1, Page : 13-30.
- Bastian, Indra., 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga : Jakarta.
- Bisma, I Dewa Gde dan Susasnto, Hery.2010..*Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007.*
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan. Indeks : Jakarta.
- Fauzan, Julio Achmad, “Penerapan Prinsip Audit Forensik Dalam Investigasi Atas Fraud Pada Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus pada PT Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta). Skripsi. Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Hadi, Syamsul. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi & Keuangan. Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Hadi, Syamsul. 2007. Memanfaatkan Excel Untuk Analisis Statistik. Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendaliani Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul, dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014,Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,Salemba Empat : Jakarta.
- Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Bumi Aksara : Jakarta.

- Katoppo, Yudhistira. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi. Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Pres : Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, Sulistiyowati, Firma dan Purwanugraha Heribertus. 2006. Akuntansi Sektor Publik. BPFE : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Nazir. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis di Indonesia* No. 1 Vol. 13, April 2008, Halaman 48-58.
- Nurulafifah, Tyas. 2012. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2010", *Jurnal*

Kajian Pendidikan & Akuntansi Indonesia Edisi 1 Volume 1, Tahun 2012,
Halaman 1-21.

Noordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2007.
Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat : Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 25 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah.

Perwira, Muhammad Yogi, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007-
2013”. Skripsi. Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahmawati, Amalia. 2009. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Surplus Defisit
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi. Fakultas
Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Sijabat, Saleh, Wachid. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan
KeuanganPemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi
pada DinasPendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kota MalangTahun Anggaran 2008-2012). Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas BrawijayaMalang.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung.

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Yusniyar, Darwanis, dan Abdullah, Syukriy. 2016. "*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan : Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh*". *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 5, No 2, Halaman 100-114.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran Data Laporan Realisasi
Anggaran Tahun Anggaran 2010-2016
- Rekapitulasi Penyertaan Modal (Modal
Disetor) Dan Penerimaan Laba Disetor
Dari BUMD Kabupaten Sleman